KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Politisasi Kebijakan Perburuk Citra DPR
Tanggal : Sabtu, 17 Oktober 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Politisasi Kebijakan Perburuk Citra DPR

JAKARTA – Penolakan sejumlah anggota DPR terhadap kenaikan tunjangan beberapa waktu lalu dinilai lebih bermuatan politis. Sebab penolakan tanpa disertai keputusan resmi oleh lembaga akhirnya tidak memberi pengaruh apa-apa. Terbukti, pada awal Oktober ini kenaikan tunjangan tersebut sudah masuk ke rekening 560 anggota DPR.

Akhirnya kesan yang muncul adalah anggota DPR masih senang melakukan politisasi kebijakan, terutama jika itu berpotensi merugikan dirinya akibat mendapat sorotan negatif publik. "Suara penolakan sekarang ini tidak bermakna apa-apa. Mestinya kalau DPR serius menolak, waktunya pada proses pembahasan dulu. Penolakan sekarang lebih bernuansa politis," kata peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kemarin.

Politisasi kebijakan ini berpotensi memperburuk citra DPR di mata publik. Menurut Lucius, meskipun usulan kenaikan tunjangan DPR sudah disepakati pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kalau ada keputusan resmi dari DPR, keputusan tersebut bisa saja dibatalkan. "Masalah kita saat ini DPR kerap memolitisasi kebijakan-kebijakan tertentu, termasuk keputusan soal kenaikan anggaran untuk mereka ini," ungkapnya.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah memastikan kenaikan tunjangan untuk pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR sudah cair per awal Oktober ini. Dengan cairnya dana tersebut, anggota DPR yang sebelumnya menolak dan berjanji mengembalikan kini ditantang untuk membuktikan ucapannya. Pembuktian tersebut penting untuk menghindarkan anggota DPR atas tuduhan pencitraan.

BURT juga mempersilakan anggota DPR yang ingin mengembalikan kenaikan tunjangannya dan siap difasilitasi. "Saya nanti akan tanda tangan ucapan terima kasih. Itu jika ada yang kembalikan," ujar Dimyati.

Hingga kemarin, satu fraksi yakni Fraksi Partai NasDem dan satu anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani sudah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR atas penolakannya menerima kenaikan tunjangan.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Irma Suryani mengungkapkan, fraksinya sudah mengirimkan surat ke Sekjen DPR yang intinya meminta agar total kenaikan tunjangan, yakni sebesar Rp6.724.000 dan dipotong pajak 15% menjadi Rp 5.715.400, untuk tidak dikirimkan ke seluruh anggota Fraksi Partai NasDem. "Sehubungan dengan itu, mulai Oktober 2015 dan seterusnya untuk diberhentikan dan tidak diberlakukan," kata Irma Suryani.

rahmat sahid